

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dijalankan secara berkesinambungan sebagai perbaikan taraf hidup masyarakat, tujuannya adalah menciptakan lingkungan kehidupan yang produktif, memiliki kehidupan yang layak, memperluas ekonomi dan seluruh sistem sosial bagi setiap individu maupun bangsa secara keseluruhan, sehingga dengan pembangunan dapat memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang serta hidup sehat. (Verawaty & Salwa, 2023). Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah mengalami kekurangan potensi dan sumber daya alam yang memadai, maka dapat mengoptimalkan sumber daya manusia untuk pengembangan daerah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya (Rosita & Muzdalifah, 2023).

Pembangunan ekonomi daerah memerlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk mampu mengelola potensi dari sumber daya yang dimiliki daerahnya (Helly, 2019). Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih aktif lagi dalam mengelola dana penerimaan pemerintah. Setelah Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan, maka setiap pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengurus daerahnya, termasuk pengelolaan keuangan daerahnya.

Otonomi daerah hakikatnya adalah usaha memberdayakan daerah agar dapat mengambil keputusan secara lebih luas dan bertanggungjawab, serta menggali sumber – sumber keuangan daerah sendiri untuk membiayai apa saja penyelenggaraan pemerintahannya. Setiap daerah harus mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya masing – masing agar tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut hakikatnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun suatu pembangunan yang berkelanjutan (Mongan, 2019). Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi hal yang penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. IPM mencakup aspek-aspek vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, yang secara bersama-sama mencerminkan derajat pembangunan manusia. Jika ketiga komponen tersebut dapat tercapai dengan baik dan menunjukkan kemajuan maka sumber daya manusia akan memiliki kualitas yang sejalan.

Pulau Papua masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan manusia. Walaupun Pulau Papua memiliki keberagaman budaya, kekayaan alam yang melimpah, dan potensi ekonomi yang dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, kendala-kendala seperti ketidaksetaraan pendapatan, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur masih perlu diperkuat. Pulau Papua masih menghadapi

tantangan serius dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Faktor-faktor seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang terbatas, tingginya tingkat kemiskinan, serta konflik sosial dan keamanan, merupakan hambatan utama dalam pencapaian pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Pulau Papua sebagai salah satu wilayah di Indonesia memiliki karakteristik geografis, ekonomis, dan sosial yang unik. Meskipun Papua memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pembangunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tabel 1.1 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia menurut kategori pulau/ kepulauan yang ada di Indonesia Tahun 2021 – 2023

Tabel 1. 1
IPM Per Wilayah di Indonesia
Tahun 2019 – 2023

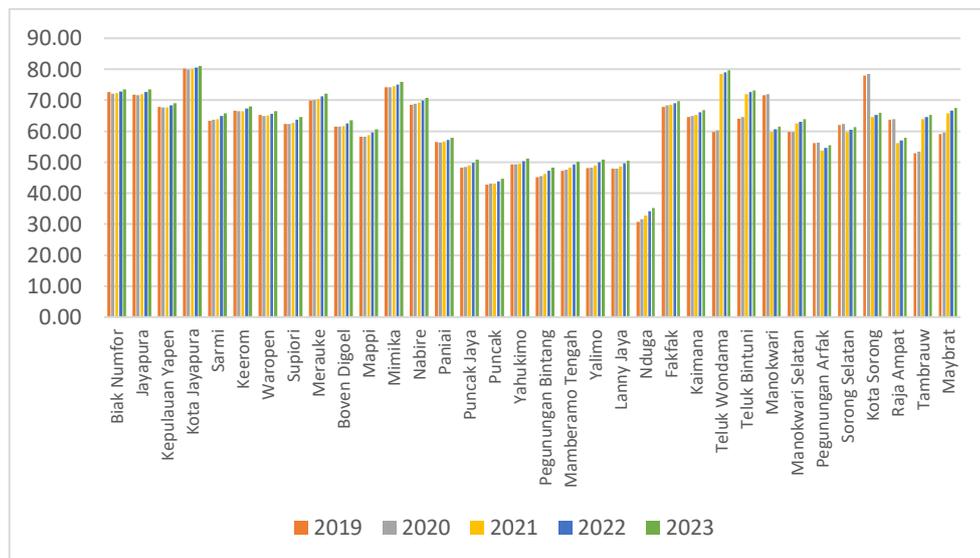
Pulau/Kepulauan	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera	71,79	71,83	72,07	72,66	73,28
Jawa	74,74	74,81	75,13	75,71	76,32
Bali & Nusa Tenggara	69,58	69,65	69,87	70,60	71,33
Kalimantan	71,41	71,30	71,70	72,27	72,96
Sulawesi	69,93	70,11	70,39	70,98	71,59
Maluku	69,08	68,99	69,24	69,85	70,58
Papua	62,77	62,77	62,94	63,64	64,46
Indonesia/ IPM Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Tabel 1.1, menunjukkan angka IPM di Pulau Papua merupakan indeks yang paling rendah. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun

IPM di Papua termasuk yang paling rendah apabila dibandingkan dengan IPM pada daerah/ pulau lain di Indonesia. Menurut BPS, Papua merupakan provinsi dengan IPM terendah. Nilai IPM Papua dalam lima tahun terakhir selalu berada dibawah IPM nasional. Daerah dengan IPM rendah tentunya memerlukan suatu pembangunan yang lebih dibandingkan dengan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi. Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Papua tahun 2019 – 2023 dapat dilihat melalui grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Pulau Papua
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Diolah 2024

Pada grafik di atas dapat dilihat angka Indeks Pembangunan Manusia tertinggi terdapat di Kota Jayapura dimana pada lima tahun terakhir rata-rata IPM Kota Jayapura mencapai angka diatas 80.00. Hal ini menunjukkan bahwa IPM di kota tersebut tergolong sangat tinggi, bahkan tertinggi di Papua, karena

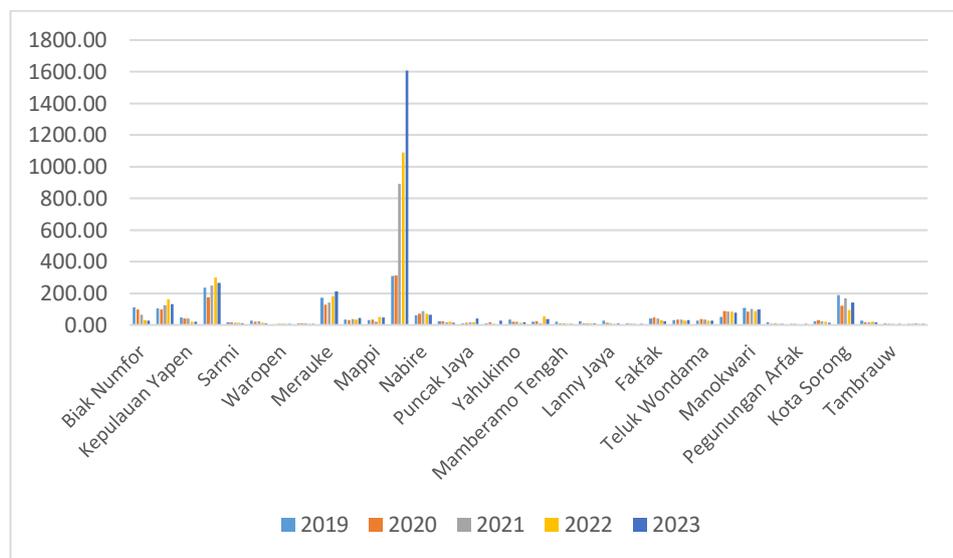
Kota Jayapura menjadi satu-satunya daerah di Pulau Papua yang memiliki IPM diatas 80.00. Dengan angka IPM tersebut menandakan bahwa Kota Jayapura mempunyai kualitas hidup manusia yang baik dibandingkan dengan kabupaten/ Kota yang lain. Sedangkan capaian IPM terendah diduduki oleh kabupaten Nduga pada tahun 2019 memiliki IPM 30.75, walaupun mengalami peningkatan dari tahun ketahun hingga di tahun 2023 mencapai 35.19, namun angka ini masih tergolong rendah. Pada Kabupaten lain masih banyak yang memiliki IPM dibawah 70.00. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Papua belum memiliki kualitas sumber manusia yang baik. Rendahnya IPM di Papua menunjukkan kurangnya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Berbicara mengenai pemerataan pembangunan, erat kaitannya dengan persoalan desentralisasi fiskal yang berarti pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Patadang *et al.* (2021) mengemukakan bahwa dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pembangunan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, tentunya memerlukan dana atau anggaran untuk melakukan pembangunan. Hasan & Agung (2018) mengemukakan bahwa sumber untuk membiayai belanja daerah berasal dari PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendanaan yang bersumber langsung dari kegiatan ekonomi di daerah tersebut. PAD melibatkan berbagai jenis penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha milik daerah. Kemampuan daerah

dalam mengelola PAD-nya akan mempengaruhi daya dukung finansial untuk program-program pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan manusia.

Grafik 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Papua
Tahun 2019 – 2023



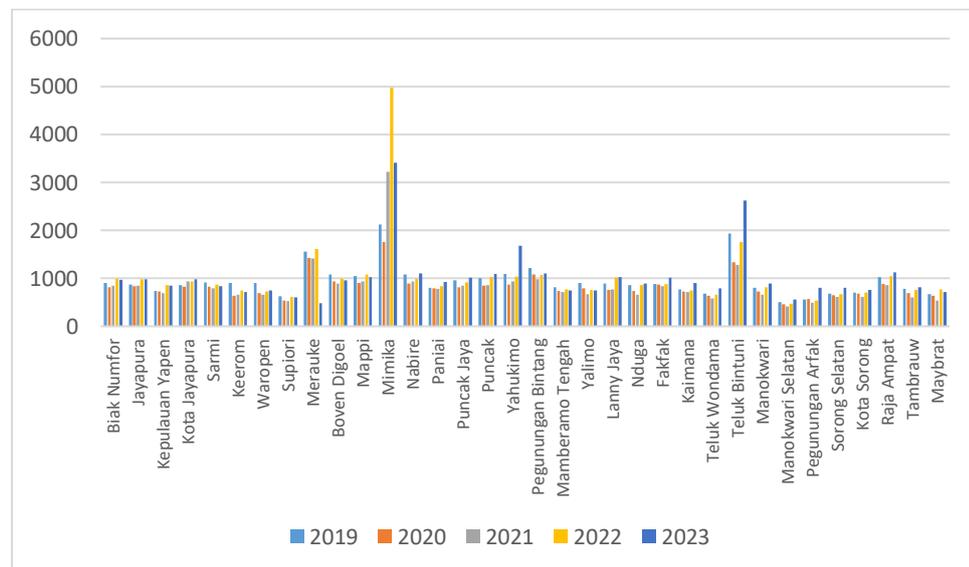
Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan grafik 1.2 di atas jika dilihat berdasarkan wilayah di Papua, sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Mimika memiliki Pendapatan Asli Daerah paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Tercatat Kabupaten Mimika merupakan daerah yang memiliki daerah pertambangan yang sangat besar, memiliki potensi tembaga dan emas terbesar di dunia yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan multinasional yaitu *PT. Freeport Indonesia*, sehingga tak heran jika Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika melambung tinggi. Di tahun 2023 Kabupaten Mimika memperoleh

PAD sebesar 1608,38 miliar rupiah. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah kabupaten/kota lain.

Pada kenyataannya jumlah PAD suatu daerah dan daerah lainnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah, seperti dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini merupakan penerimaan yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke tiap-tiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Data tersebut dapat dilihat melalui grafik 1.3 di bawah ini .

Grafik 1.3
Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Pulau Papua
Tahun 2019 – 2023

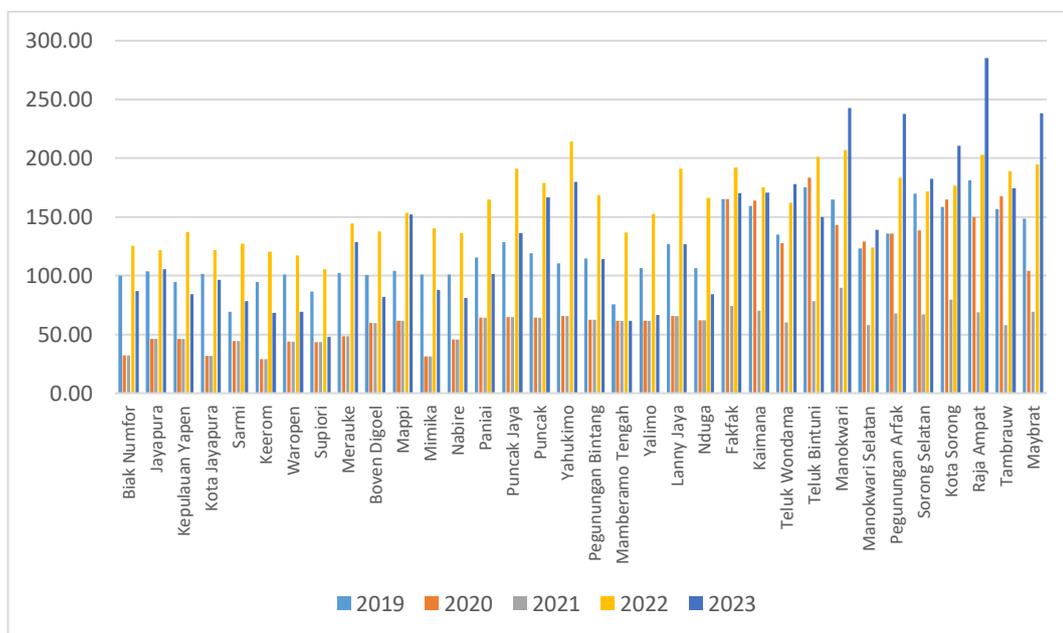


Sumber : Data Diolah 2024

Berdasarkan data dari grafik 1.3 diatas, dapat dilihat dana Perimbangan dari tahun 2019 – 2023 secara keseluruhan mengalami perubahan yang fluktuasi, kadang naik dan kadang turun. Kabupaten Mimika merupakan daerah yang memiliki dana perimbangan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mendukung daerah yang mungkin mengalami keterbatasan sumber daya. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan rendah serta mendukung daerah-daerah yang mungkin kesulitan mencapai tingkat pembangunan yang setara dengan daerah-daerah lainnya agar dapat menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah.

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di suatu daerah. Dana ini digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan tambahan biaya infrastruktur. Berdasarkan UU No. 21 Tahun (2001) dan Perdasus No. 13 Tahun (2016), minimal 30% dari dana ini harus dialokasikan untuk biaya pendidikan dan minimal 15% untuk peningkatan kesehatan dan gizi. Pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah memberikan kebebasan bagi penduduk daerah tersebut untuk mengelola sendiri administrasi ekonominya. Bentuk otonomi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia di Papua.

Grafik 1.4
Dana otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Pulau Papua
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Diolah 2024

Berdasarkan data dari grafik 2.4 diatas Dana Otonomi Khusus mengalami fluktuasi disetiap Kabupaten/Kota di Pulau Papua dari tahun 2019-2023. Dana Otonomi Khusus tertinggi pada tahun 2019 ada di kabupaten Raja Ampat dengan angka 181.00 miliar. Tahun 2020 Kabupaten Teluk Bintuni dengan angka 183,43 miliar rupiah. Tahun 2021 Manokwari 89,60 milar. Tahun 2022 Yahukimo dengan 213,34 miliar. Tahun 2023 Kabupaten Raja Ampat dengan nilai 285,18 miliar

Dana Otonomi Khusus di papua ditujukan untuk mendanai sektor pendidikan dan kesehatan. Luasnya wilayah Papua dan banyaknya daerah terpencil dengan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua. Pembangunan di

sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan melalui belanja modal secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apabila dana ini digunakan secara bijak, maka akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat (Williantara & Budiasih, 2016). Oleh karena itu, Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

Pentingnya peran PAD, Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dalam konteks pembangunan daerah, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai pengaruh ketiganya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Analisis yang komprehensif terkait interaksi antara PAD, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan IPM dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mencapai tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Studi terdahulu yang mengkaji Indeks Pembangunan Manusia telah banyak dilakukan. Akan tetapi, beberapa studi tersebut fokus mengkaji pertumbuhan IPM pada skala kecil, yaitu seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Masih belum ada penelitian yang khusus berfokus mengkaji IPM kabupaten/kota di Pulau Papua saja. Padahal, kajian-kajian seperti ini sangat diperlukan dalam perencanaan dan perumusan strategi yang berkaitan dengan peningkatan angka pembangunan manusia di Pulau Papua. Kajian ini

menjadi *urgent* dilakukan mengingat BPS menetapkan kabupaten/kota di Pulau Papua sebagai daerah tertinggal tahun 2019-2023.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan IPM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan koordinasi antara tingkat pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan manusia yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Terdapat *research gap* dari penelitian sebelumnya, beberapa hasil penelitian terkait pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Boling *et al.* (2023), Wati *et al.* (2023), Fernandes & Putra (2022), Fahrudin *et al.* (2022) serempak menjelaskan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap IPM, yang artinya apabila PAD meningkat maka IPM akan meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh alokasi Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi telah dimanfaatkan dengan baik sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Karampuan *et al.* (2023) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM, karena PAD dialokasikan untuk kebutuhan lain diluar komponen IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Saswatata & Parju (2022), Kamarni *et al.* (2022) mengemukakan bahwa seluruh komponen dari dana perimbangan

berpengaruh terhadap IPM, Dana Perimbangan sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik, sehingga meningkatnya Dana Perimbangan akan meningkatkan IPM. Sedangkan Melgiana *et al.* (2020), Nashshar (2022) menyatakan DAU, dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa DAK masih berupa dana potensial dalam melaksanakan pembangunan, sehingga belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan apabila tidak dikelola secara efektif dan efisien.

Muhtarulloh (2021), Syafira (2019), mengemukakan bahwa dana otus berpengaruh terhadap IPM, penelitiannya menegaskan bahwa setiap peningkatan Dana Otonomi Khusus akan meningkatkan IPM di Kota Langsa. Sementara penelitian yang dilakukan Kharisma *et al.* (2020) menyatakan bahwa Dana Otus tidak berpengaruh terhadap IPM, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan dan Kesehatan, besarnya tidak sebanding dengan permasalahan pendidikan dan kesehatan di Papua.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pertama, terletak pada perbedaan periode, objek, dan data sampel. Kedua, penelitian ini menggabungkan komponen Dana Perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK, dan DBH agar lebih menggambarkan pengaruh Desentralisasi Fiskal secara keseluruhan pada IPM. Ketiga, agar berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel Dana Otonomi Khusus, karena penulis ingin mengetahui sejauhmana Dana Otonomi Khusus yang

diterima atau dikhususkan untuk daerah Papua memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah di Pulau Papua pada tahun 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua?
- 2 Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua?
- 3 Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.

- c. Untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya yang mengkaji faktor-faktor yang yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah, lembaga pembangunan, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam upaya mencapai pembangunan manusia yang lebih baik dan merata di daerah Papua dan memberikan inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia yang memiliki tantangan serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan koordinasi antara tingkat pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan manusia yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

b. Bagi akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian dan sebagai perbandingan atau referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada topik serupa dimasa yang akan datang.

c. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai pembelajaran bagi penulis dalam menerapkan teori-teori akademis yang telah diperoleh selama di perguruan tinggi, dan sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana terapan pada program diploma IV Akuntansi Perpajakan. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis, mengenai Indeks Pembangunan Manusia yang dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan karya tulis atau penelitian adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan landasan teoritis yang menjadi acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengambilan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis).

BAB V PENUTUP

Bab kelima menjelaskan uraian tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan dari hasil penelitian.